

## SIARAN PERS

### Rokok Ilegal dan Paradoks Kebijakan Cukai: Dari Pelanggaran ke Insentif

**Jakarta, 9 April 2026** – Isu [rencana penambahan layer cukai](#) oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk rokok ilegal kembali mencuat di tengah meningkatnya [dugaan kolusi antara industri rokok besar dan oknum aparat bea cukai](#). Alih-alih memperkuat penegakan hukum, kebijakan ini justru berisiko mengaburkan akar persoalan dan menguntungkan pihak yang seharusnya dikenai sanksi.

RUKKI menilai bahwa pendekatan ini mencerminkan paradoks dalam kebijakan publik di Indonesia, di mana pelanggaran tidak ditindak secara tegas, melainkan berpotensi diakomodasi melalui skema kebijakan fiskal.

Kebijakan yang tidak didasarkan pada penegakan hukum yang kuat berisiko membuka ruang bagi tata kelola yang lemah, termasuk konflik kepentingan dan potensi korupsi. Dalam konteks ini, dugaan kolusi antara pelaku industri dan oknum aparat harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

Tanpa pembenahan mendasar pada sistem pengawasan dan penegakan hukum, kebijakan fiskal seperti penambahan layer cukai justru berpotensi menjadi solusi semu yang tidak menyentuh akar masalah.

*“Ironisnya, dalam praktik kebijakan di Indonesia, pelanggaran justru berisiko ‘diganjar’ insentif, bukan sanksi. Penambahan layer cukai menunjukkan bagaimana kebijakan yang seharusnya menekan rokok ilegal justru berpotensi mengkomodasinya. Jika kebijakan ini tidak efektif dan rokok ilegal tetap marak, apakah solusi yang diambil adalah menambah layer baru lagi?”* ujar Mouhamad Bigwanto, Direktur Eksekutif RUKKI.

Di berbagai negara, industri tembakau diketahui memanfaatkan isu rokok ilegal untuk keuntungan mereka. [Laporan](#) terbaru dari Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) menunjukkan bahwa narasi perdagangan rokok ilegal secara sistematis digunakan untuk memengaruhi arah kebijakan dan menghambat implementasi pengendalian tembakau yang efektif.

*“Industri tembakau telah mengalihkan perhatian pemerintah dari masalah utama, yaitu penyelundupan, dan memposisikan dirinya seolah-olah menjadi bagian dari solusi. Padahal, argumen industri dan rekomendasi untuk bekerja sama dengan mereka tidak menyelesaikan masalah,”* ujar Dr. Mary Assunta, Penasihat Kebijakan Senior SEATCA.

Ia menambahkan bahwa pengalaman di Malaysia menunjukkan kegagalan pendekatan tersebut. *“Pemerintah Malaysia pernah diyakinkan oleh industri rokok untuk memberlakukan moratorium kenaikan pajak selama 10 tahun. Namun setelah itu, perdagangan ilegal tidak menurun, dan justru industri tembakau yang diuntungkan,”* lanjutnya.

RUKKI menegaskan bahwa pemerintah perlu mengembalikan fokus pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, bukan pada skema kebijakan yang berpotensi mengakomodasi praktik ilegal.

*“Masalah rokok ilegal tidak bisa diselesaikan dengan memberi ruang bagi pelanggaran dan menjadikan para pelanggar sebagai mitra. Justru diperlukan keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten dan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan industri,”* tegas Direktur Eksekutif RUKKI.

**-SELESAI-**

**Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:**

**Anida Laela Salma**

Program Support Officer, RUKKI

✉ Email: [anida.salma@rukki.org](mailto:anida.salma@rukki.org)

☎ Mobile: +62 823-1333-5107

**Ms. Cyresse Ann Achilleos**

Media and Communications Officer, SEATCA

✉ Email: [cyresse@seatca.org](mailto:cyresse@seatca.org)

☎ Mobile: +63 975 701 7130

**Tentang RUKKI:**

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mendorong kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis bukti tanpa campur tangan industri yang merugikan kesehatan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi katalisator perubahan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui advokasi, penelitian, dan edukasi kesehatan di Indonesia.

🌐 Website: <https://rukki.org/>

**Tentang SEATCA:**

SEATCA adalah aliansi non-pemerintah lintas sektor yang mendukung negara-negara ASEAN untuk mempercepat dan secara efektif mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian tembakau yang tercantum dalam *WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. SEATCA merupakan entitas terakreditasi ASEAN dan berstatus sebagai Pengamat resmi dalam *WHO FCTC Conference of the Parties*. WHO menganugerahkan kepada SEATCA *World No Tobacco Day Award* pada tahun 2004 dan *WHO Director-General's Special Recognition Award* pada tahun 2014.

🌐 Website: <https://seatca.org/>